

**EVALUASI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI RT 02 RW 01
KAMPUNG TERBAN, KELURAHAN TERBAN, KEMANTREN
GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

WANDA AZIZA

NIT. 22313990

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The demand for land continues to rise alongside population growth and area development, yet land availability is increasingly limited. This situation has led to the emergence of poorly controlled settlements, resulting in environmental degradation or the formation of slum areas. One government initiative to address slum settlements is the implementation of a renewal program. This study aims to identify the stages of the renewal process and the resulting socio-economic impacts on the community in RT 02 RW 01 Kampung Terban, Terban Urban Village, Gondokusuman District, Yogyakarta City. A qualitative method with a descriptive analysis approach was employed. This allowed for a clear delineation of the renewal stages, spanning pre construction, construction, and post construction phases. Observed social impacts include changes in social well-being and lifestyle, while economic impacts involve changes in income, employment, and asset ownership specifically the acquisition of legal tenure from the Yogyakarta Sultanate.

Keywords: Slum Settlements, Renewal, Socio Economic Impact.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Defenisi Operasional.....	25
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	26
E. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV	35

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	35
A. Gambaran Wilayah Administrasi Kelurahan Terban.....	35
B. Gambaran Umum Wilayah Rumah Deret Terban Madani	37
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat RT 02 RW 01 Kampung Terban	40
BAB V.....	41
PELAKSANAAN PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI RT 02 RW 01	
KAMPUNG TERBAN.....	41
A. Kondisi RT 02 RW 01 Kampung Terban Sebelum Pelaksanaan Peremajaan	41
B. Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh RT 02 RW 01 Kampung Terban	46
C. Evaluasi Program Peremajaan berdasarkan Konsep ATLAS.....	51
D. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh RT 02 RW 01 Kampung Terban.....	61
BAB VI	63
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN	
KUMUH DI RT 02 RW 01 KAMPUNG TERBAN	63
A. Dampak Sosial	63
B. Dampak Ekonomi.....	65
BAB VII	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Allen et al., (2018) pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki tujuh belas tujuan pembangunan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global yang kompleks, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta perlunya menjaga keberlanjutan pembangunan (Zen dkk., 2025). Untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan pada point 11 berfokus pada menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Di wilayah perkotaan, laju pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan ruang yang tidak sebanding dengan ketersediaannya (Santosa & Rais, 2021).

Perkembangan kawasan perkotaan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Pesatnya laju urbanisasi, pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas di wilayah perkotaan mendorong meningkatnya kebutuhan akan lahan permukiman. Namun, keterbatasan ketersediaan lahan di wilayah perkotaan sering kali menyebabkan tekanan terhadap pemanfaatan ruang (Harahap Insan, 2021). Apabila kondisi tersebut tidak dikelola secara optimal melalui kebijakan tata ruang yang efektif, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan penurunan kualitas lingkungan serta munculnya permukiman kumuh (Achmad, 2023).

Menurut Amar (2009) perkembangan suatu kota disebabkan beberapa fenomena seperti perubahan ruang-ruang kota secara sistematis sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Fenomena tersebut memicu akan munculnya pemanfaatan ruang di kawasan yang seharusnya dilindungi seperti sempadan sungai (Wijaya dkk., 2017).

Pemanfaatan ruang di area bukan peruntuknya akan menyebabkan penurunannya kualitas sehingga menjadi kumuh (Arung & Ulimaz, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Fitri (2021) keberadaan permukiman kumuh berdampak besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu kota seperti berkurangnya kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh. Pemerintah juga akan kehilangan kendali terhadap penduduk perkotaan terutama di kawasan kumuh yang berpotensi terhadap peningkatan kejahatan dan penyakit. Dalam konteks perkotaan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yaitu sulit menyediakan tempat tinggal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Febriana dkk., 2022). Adapun ekonomi masyarakat yang rendah dapat mengakibatkan semakin tingginya angka kriminalitas di permukiman kumuh (Saputra dkk., 2022).

Tantangan terbesar dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah yakni ketersediaan lahan terutama di kota-kota besar yang harganya sudah tidak terkendali. Sehingga sempadan sungai dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk hunian yang memiliki keterbatasan akses terhadap lahan hunian yang layak (Berliana & Pujiati, 2018). Dari ekonomi masyarakat yang rendah dapat mengakibatkan semakin tingginya angka kriminalitas di permukiman kumuh (Saputra dkk., 2022). Penelitian oleh Amelia & Dwisaraswati (2019) menunjukkan bahwa kawasan sempadan sungai cenderung mengalami tekanan pemanfaatan ruang akibat kebutuhan lahan permukiman yang tinggi, terutama di kawasan perkotaan yang padat.

Permasalahan tersebut menjadi isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah (Kementerian PUPR, 2019).

Salah satu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh terdapat tiga cara pola penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pola penanganan tersebut meliputi Pemugaran, Peremajaan, dan Permukiman Kembali. Tujuan peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Misi terlaksananya program KOTAKU sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai target tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 khususnya bidang pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh sampai dengan 0 Ha di tahun 2024. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara nasional melalui program DAK Terintegrasi bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi.

Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai menjadi salah satu isu pembangunan yang sangat penting dalam rangka menciptakan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini akan mengedepankan prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kawasan permukiman kumuh, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui peremajaan kawasan dengan konsep konsolidasi lahan yang memungkinkan pengembangan kawasan menjadi lebih tertata dengan baik dan lebih nyaman untuk dihuni. Penataan ini juga bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Implementasi konsep konsolidasi lahan akan menjadi salah satu upaya strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Melalui konsolidasi ini, tanah yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik akan dikelola menjadi kawasan yang lebih fungsional dan teratur, yang pada akhirnya dapat mendukung ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029).

Program KOTAKU telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang di terapkan di RT 02 RW 01 Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Berdasarkan pada SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Luasan permukiman kumuh keseluruhan di Kota Yogyakarta sebesar 114,7 Ha. Secara spesifik pada RT 02 RW 01 dengan luas 2,328 Ha kategori kumuh ringan dan status lahan Sultan Ground serta berbatasan langsung dengan sungai Code. Berdasarkan Laporan Perumahan dan Permukiman Layak Huni Menuju Kampung Madani oleh DPUPKP Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penanganan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dengan metode peremajaan dengan konsep konsolidasi lahan sehingga masyarakat tidak perlu di relokasi hal ini menjadi solusi dari keterbatasan lahan.

Sejalan dengan PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 permukiman kumuh ditandai dengan bangunan-bangunan yang ada terlalu berdekatan dan akses jalan yang hanya selebar kurang lebih 1,5 meter, yang mana jika ada situasi darurat mobil ambulans ataupun pemadam kebakaran tidak bisa masuk. Selain itu, dari kondisi lingkungannya terlihat belum ada sarana 4 instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga masyarakat masih membuang semua limbah domestik ke sungai dan berakibat pada kualitas kebersihan air sungai yang menurun atau bahkan menjadi sumber penyakit. Kondisi tersebut menjadikan kawasan bantaran Sungai Code sebagai salah satu sasaran peremajaan dengan konsep konsolidasi lahan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Penelitian Azzahra dkk (2024) menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh perlu diarahkan pada terciptanya permukiman yang aman, tertib, dan sehat melalui penyediaan prasarana lingkungan yang memadai.

Rumah deret ini sering dijumpai di daerah pinggiran perkotaan akibat mahalnya harga lahan di tengah kota. Rumah deret menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak swasta bagi masyarakat menengah ke bawah untuk dapat memiliki rumahnya sendiri (Asnur et al., 2019). Rumah deret ini menjadi solusi dalam penataan permukiman kumuh di lahan yang terbatas dengan bangunan bergandeng antara rumah satu dengan yang lainnya. Dari pelaksanaan peremajaan ini menghasilkan rumah deret Terban Madani yang keberadaannya memiliki manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tahapan penataan permukiman kumuh melalui peremajaan dan dampaknya dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan pada masyarakat RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan Peremajaan permukiman kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi pasca Peremajaan permukiman kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis tahapan Peremajaan permukiman kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi pasca Peremajaan permukiman kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu serta wawasan dalam Peremajaan permukiman kumuh baik pada tahapan pelaksanaan maupun dampak sosial dan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan Peremajaan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta maupun di wilayah lain serta sebagai masukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Peremajaan permukiman kumuh selanjutnya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tahapan Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018. Tahapan tersebut meliputi pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Pendanaan proses peremajaan tersebut melalui dana APBD dan DAK.
2. Dampak sosial dan ekonomi pasca peremajaan RT 02 RW 01 Kampung Terban:
 - a. Kondisi sosial

Kondisi sosial masyarakat mengalami beberapa perubahan setelah dilaksanakan program peremajaan permukiman kumuh yakni hubungan antar penghuni rumah deret Terban Madani menjadi lebih dekat dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan nyaman serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kelembagaan.

- b. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat mengalami beberapa perubahan setelah dilaksanakan program peremajaan permukiman kumuh berdasarkan pendapatan masyarakat menjadi lebih berat, karena penghasilan tetap namun pengeluaran masyarakat meningkat untuk kebutuhan air, listrik, sampah serta iuran lingkungan. Sebagian WTP mengalami perubahan mata pencaharian yang terjadi dari tukang rosok menjadi gejek. Kepemilikan asset masyarakat berupa tanah dan bangunan yang dimiliki seluruhnya menjadi permanen dan berdiri dengan alas hak SHGB diatas Sultan Ground.

B. Saran

Rumah Deret Terban Madani yang dikembangkan sebagai proyek percontohan (*pilot project*) dalam penataan kawasan permukiman bantaran sungai perlu dievaluasi secara menyeluruh guna menilai efektivitas, keberlanjutan, serta berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki, sehingga penerapan model penataan serupa pada lokasi lain dapat dilakukan secara lebih tepat dan kontekstual. Selain itu, berbagai potensi dampak negatif yang muncul selama tahapan pelaksanaan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan strategi penataan kawasan permukiman di masa mendatang agar tujuan peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberta, M., Nugroho, T., Amrullah, M. N. K., & Suharto, E. (2024). Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta. *Jurnal Pertanahan*, 14(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v14i2.273>
- Achmad, W. (2023). Rusun Tamansari Dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh. *Anterior Jurnal*, 22(3). <https://doi.org/10.33084/anterior.v22i3.4985>
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. In *Sustainability Science* (Vol. 13, Number 5). <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>
- Amalia, A. A., & Fuadillah, S. (2024). Analisis Tingkat Keteraturan Bangunan Hunian Kelurahan Kampung Buyang Kota Makassar. *Journal of Green Complex Engineering*, 1(2), 79–88. <https://doi.org/10.59810/greenplexresearch.v1i2.93>
- Amar. (2009). Identitas Kota, Fenomena, dan Permasalahannya. *Jurnal Ruang*, 1(1).
- Amelia, S., & Dwisaraswati, G. (2019). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Sempadan Sungai Sario di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 13(1).
- Anisatu Rodiyah, Ellisabet Ambar Eka Sari, Nindya Faristanti, Raphael Arya Hangono, Yusuf Riyan Prasetyo, Rina Jauza Luthfiya, & Widya Kusuma Putri. (2025). Penataan Kawasan Kumuh: Studi Kasus Kampung Ledhok Timoho di Bantaran Sungai Gajah Wong. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 2(2). <https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i2.1518>
- Arung, R., & Ulimaz, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4). <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.37953>
- Asnur, S., Idris, S., & Mustafa, S. (2019). Pola Tata Ruang Rumah Deret dan Pengaruhnya Terhadap Optimasi Penghawaan Alami. *UNM Environmental Journals*, 3(1).
- Asyiawati, Y., & Oktavya, N. E. (2017). Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Sekitar Kawasan Kalimalang Kota Bekasi Secara Berkelanjutan. *Jurnal*

Perencanaan Wilayah Dan Kota, 14(1).
<https://doi.org/10.29313/jpwk.v14i1.2550>

Azzahra, A., Kadri, M. K., Hidayat, A., & Astha, D. P. (2024). Arahan Peningkatan Kualitas Permukiman Dengan Konsep Healthy Settlements. *COMPACT: Spatial Development Journal*, 3(1).
<https://doi.org/10.35718/compact.v3i1.1152>

Berliana, L. E., & Pujiati, A. (2018). Analisis Kebijakan Permukiman Liar di Sempadan Banjir Kanal Timur. *Economics Development Analysis Journal*, 6(3). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

Cay, T., & Satilmis, R. Y. (2024). Economic analysis of land consolidation project: Kızılcabölük neighborhood, Tavas-Denizli-Turkey Province. *International Journal of Engineering and Geosciences*, 9(3).
<https://doi.org/10.26833/ijeg.1429522>

Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper*, 296.

Dewi, F. R., & Nareswari, A. (2025). Kriteria Dalam Menilai Livabilitas Permukiman Kumuh Pasca Program Upgrading Berbasis Studi Literatur Dan Konteks Lokal. *Journal of Architectural Design and Development*, 6(1).
<https://doi.org/10.37253/jad.v6i1.10338>

Drakel, A. (2024). Konsep Pembangunan Tata Ruang, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Studi Wilayah Perkotaan). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, 6(1).

Fakhri, H., Astuti, W., & Andini, I. (2023). Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan HP 00001 Kelurahan Mojo dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Desa-Kota*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.67515.64-76>

Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). *Jurnal Fundamental Justice*.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.2414>

Fitri, D. A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Journal Unesa*.

Harahap Insan, H. (2021). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Dampaknya Bagi Warga Kota Dki Jakarta. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)*, 4(1), 18–24.

- Kurniawan, K. D., Hardiana, A., & Putri, R. A. (2015). Komparasi Perubahan Aspek Sosial Ekonomi Pada Penghuni Rumah Susun Pasca Penanganan Squatter Di Kota Surakarta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/region.v6i1.8494>
- Mikyal Hardiyati, Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Najah, L. (2020). Perubahan Sosial Pada Warga yang Terlokasi Ke Rumah Susun Muara Baru Akibat Normalisasi Waduk Pluit. *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJ A_PRINT.Docx*, 21(1).
- Oktarini, M. F., Lusetyowati, T., & Primadella, P. (2022). Persepsi Pemukim terhadap Kualitas Lingkungan di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang. *Jurnal Permukiman*, 17(2). <https://doi.org/10.31815/jp.2022.17.85-92>
- Rahayu, P. D., Isa, R., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.1200>
- Santosa, T., & Rais, R. (2021). Analisis Kondisi Pemukiman Penduduk Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.53990/djep.v1i1.61>
- Saputra, W., Sukmaniar, & Hermansyah, M. H. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1, 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* - Sugiyono 2023.
- Sujatmiko, W. (2016). Penerapan Standar Keselamatan Evakuasi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 11(2). <https://doi.org/10.31815/jp.2016.11.116-127>
- Trisnaini, I., Idris, H., & Purba, I. G. (2019). Kajian Sanitasi Lingkungan Pemukiman di Bantaran Sungai Musi Kota Palembang. *JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA*, 18(2). <https://doi.org/10.14710/jkli.18.2.67-72>

- Tumengkol, S. M. (2012). Masalah Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial Dan Upaya Pemecahannya. *Karya Ilmiah*.
- Wati, S. S., Agustina, F., & Evahelda, E. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 2(1). <https://doi.org/10.33019/jia.v2i1.1121>
- Wekawati, R. T., Suminar, L., & Rahayu, M. J. (2024). Pengaruh Penataan Fisik Permukiman Kumuh terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. *Desa-Kota*, 6(2), 39. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i2.81131.39-54>
- Wijaya, K., Permana, A. Y., & Swanto, N. (2017). Kawasan Bantaran Sungai Cikapundung Sebagai Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Bandung. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 1(2), 57–68. <https://doi.org/10.31848/arcade.v1i2.7>
- Y, A. G. H., & Widiyanto. (2016). Kajian Kerawanan Longsor Tebing Sungai Code Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus : Penggal Sungai Code Antara Banteng-Gondolayu). *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Yoswara, H., Afandi, M. N., Abdullah, S., Wirjatmi TL, E., & Nurliawati, N. (2024). Implementasi Kebijakan Peremajaan Permukiman Kumuh Di Kawasan Sungai Cipelang Kota Sukabumi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.97>
- Yulianti, B. P., Baiquni, M., Ritohardoyo, S., Yunus, H. S., & Setiawan, B. (2016). Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di Kota Yogyakarta). *Majalah Geografi Indonesia*, 29(1). <https://doi.org/10.22146/mgi.13088>
- Zen, N. H., Mageiasti, L., & Yulhendri. (2025). Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3.

PERATURAN :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

BUKU

BPS. (2025). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2025. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BPS. (2025). Kecamatan Gondokusuman Dalam Angka 2025. Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Syukur. (2023). Arsitektur Rumah Sehat Bantaran Sungai. UII.